



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



(0526) 2028114 Kalimantan Selatan



DPMPSTP.Balangan@gmail.com



Jl. Jendral A. Yani KM. 1 No. 1 Paringin Kota
Kabupaten Balangan

#BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen perencanaan Kabupaten Balangan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, dan RPD dan Renstra 2021- 2026.

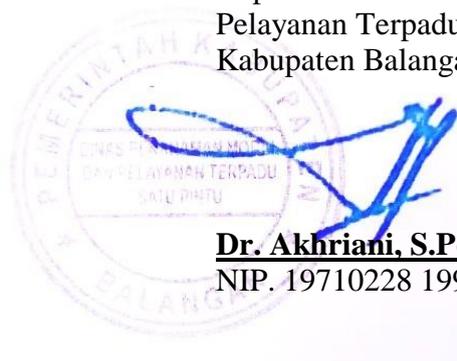
Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Balangan, Juni 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan



Dr. Akhriani, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Balangan.	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	31
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Sinergitas Kebijakan Daerah..	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Balangan Tahun 2024	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
4.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2024.....	40
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Realisasi Keuangan Program Kegiatan DPMPTSP
Kab. Balangan berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2024 Triwulan II
- Tabel 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja DMPTSP Kab. Balangan
Tahun 2024
- Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Balangan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kab. Balangan
- Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- Tabel 4.1. Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target
dan Pagu pada RKPD Perubahan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan kerja, telah disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024. Dalam Penyusunan Renja ini menyesuaikan dengan ketentuan dan sistematika yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam prosesnya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Balangan disusun untuk memperbaiki hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 oleh DPMPTSP Kabupaten Balangan.

Dengan adanya Renja Perubahan diharapkan program dan kegiatan dapat terlaksana lebih maksimal dan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No.14 Tahun 2011, maupun hasil evaluasi pelaksanaan yang dihadapi di bidang penanaman modal dan berdasarkan harapan masyarakat.

▪ Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Balangan pada Tahun 2024 adalah : Sebagai upaya perbaikan program dan kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah yang didasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, sesuai dengan rencana program prioritas.

▪ Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024 ini adalah : Untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 maupun sebagai pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun diharapkan sesuai dengan kriteria di bawah ini :

- a. Mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

- b. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan Renja Perubahan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Balangan
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja DPMPTSP Triwulan 2 tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis DPMPTSP 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah Meningkatnya Investasi Daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi mendukung terhadap terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan memiliki 6 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan 6 kegiatan penunjang dan 6 kegiatan prioritas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.639.676.442,-

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 triwulan II masih kurang, yaitu sebesar Rp. 4.252.070.488,- atau 36,53% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Program Kegiatan DPMPSTP
Kab. Balangan Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2024 Triwulan II**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,712,785,542.00	3,902,710,099.00	0	40.18
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250,925,000.00	100,909,241.00	50	40.21
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,740,000.00	24,141,980.00	50	41.10
B	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	31,755,000.00	8,745,000.00	50	27.54
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	160,430,000.00	68,022,261.00	50	42.40
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,390,783,242.00	3,100,672,522.00	50	48.52
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,729,116,682.00	2,770,257,174.00	32	58.58
B	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,576,117,560.00	315,328,948.00	50	20.01
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49,127,000.00	15,086,400.00	0	30.71
D	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36,422,000.00	-	0	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	455,262,000.00	104,495,810.00	50	22.95
A	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161,462,000.00	88,900,000.00	62.5	55.06
B	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	293,800,000.00	15,595,810.00	4.44	5.31
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	749,680,400.00	217,233,912.00	50	28.98
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,940,000.00	12,559,500.00	33.33	28.58
B	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,402,000.00	22,252,800.00	33.33	30.32
C	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,118,400.00	2,950,000.00	41.67	29.15
D	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622,220,000.00	179,471,612.00	28.85	28.84
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928,822,700.00	257,663,350.00	50	27.74
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	371,481,000.00	90,204,650.00	50	24.28
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	557,341,700.00	167,458,700.00	50	30.05

Renja Perubahan 2024 DPMPSTP
Kabupaten Balangan

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937,312,200.00	121,735,264.00	50	12.99
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	531,144,000.00	83,285,264.00	37.5	15.68
B	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	406,168,200.00	38,450,000.00	50	9.47
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	237,322,000.00	22,169,339.00	100	9.34
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	86,466,000.00	13,144,739.00	25	15.20
A	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36,766,000.00	7,804,739.00	0	21.23
B	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	49,700,000.00	5,340,000.00	50	10.74
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	150,856,000.00	9,024,600.00	0	5.98
A	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	129,906,000.00	4,016,400.00	0	3.09
B	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20,950,000.00	5,008,200.00	0	23.91
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	492,902,900.00	56,277,776.00	9.1	11.42
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	492,902,900.00	56,277,776.00	100	11.42
A	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	193,434,500.00	32,700,000.00	0	16.90
B	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	299,468,400.00	23,577,776.00	50	7.87
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	413,362,000.00	133,671,468.00	101.98	32.34
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	413,362,000.00	133,671,468.00	100	32.34
A	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	102,670,000.00	40,340,430.00	177.14	39.29
B	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	232,292,000.00	62,683,240.00	306	26.98

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

C	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	78,400,000.00	30,647,798.00	177.14	39.09
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	570,409,000.00	93,548,780.00	55.56	16.40
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	570,409,000.00	93,548,780.00	90	16.40
A	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	286,295,000.00	66,395,629.00	105	23.19
B	Pengawasan Penanaman Modal	284,114,000.00	27,153,151.00	8	9.56
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212,895,000.00	43,693,026.00	200	20.52
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212,895,000.00	43,693,026.00	100	20.52
A	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	212,895,000.00	43,693,026.00	53.85	20.52
	TOTAL PAGU SKPD	11,639,676,442.00	4,252,070,488.00		36.53

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Nilai Efisiensi	
						I		II						
1	2	3	4	7		8		9		12		13=12/7x100%	17=K13/Rp13x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	72 Nilai	9.712.785.542	0 Nilai	1.526.587.068	0 Nilai	3.902.710.099	0 Nilai	3.902.710.099	0	40.18	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	250.925.000	25%	29.933.092	50%	100.909.241	60%	111.821.241	60	44.56	135%
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58.740.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	24.141.980	1 Dokumen	27.556.980	50	46.91	107%
2	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	31.755.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.745.000	1 Dokumen	8.745.000	50	27.54	182%
3	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	160.430.000	1 Laporan	29.933.092	2 Laporan	68.022.261	2 Laporan	75.519.261	50	47.07	106%
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.390.783.242	25%	1.325.437.557	50%	3.100.672.522	60%	3.486.565.634	60	54.56	110%
4	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	4.729.116.682	16 Orang/Bulan	1.171.812.037	16 Orang/Bulan	2.770.257.174	16 Orang/Bulan	3.096.628.426	32	65.48	49%
5	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.576.117.560	3 Dokumen	144.435.520	6 Dokumen	315.328.948	7 Dokumen	369.925.808	58.33	23.47	249%

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

6	2.15.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	49.127.000	0 Dokumen	9.190.000	0 Dokumen	15.086.400	0 Dokumen	18.571.400	0	37.8	
7	2.15.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	36.422.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.440.000	50	3.95	1266%
	2.15.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	455.262.000	25%	0	50%	104.495.810	60%	104.495.810	60	22.95	261%
8	2.15.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	161.462.000	0 Paket	0	100 Paket	88.900.000	100 Paket	88.900.000	62.5	55.06	114%
9	2.15.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	45 Orang	293.800.000	0 Orang	0	2 Orang	15.595.810	2 Orang	15.595.810	4.44	5.31	84%
	2.15.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	749.680.400	25%	82.079.330	50%	217.233.912	60%	267.442.612	60	35.67	168%
10	2.15.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.940.000	0 Paket	0	4 Paket	12.559.500	4 Paket	12.559.500	33.33	28.58	117%
11	2.15.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73.402.000	0 Paket	0	4 Paket	22.252.800	4 Paket	22.252.800	33.33	30.32	110%
12	2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.118.400	0 Dokumen	0	5 Dokumen	2.950.000	5 Dokumen	2.950.000	41.67	29.15	143%
13	2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	622.220.000	40 Laporan	82.079.330	75 Laporan	179.471.612	171 Laporan	229.680.312	65.77	36.91	178%
	2.15.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	928.822.700	25%	52.950.309	50%	257.663.350	60%	285.451.405	60	30.73	195%
14	2.15.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371.481.000	3 Laporan	40.650.309	6 Laporan	90.204.650	7 Laporan	107.472.705	58.33	28.93	202%
15	2.15.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557.341.700	3 Laporan	12.300.000	6 Laporan	167.458.700	7 Laporan	177.978.700	58.33	31.93	183%
	2.15.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	937.312.200	25%	36.186.780	50%	121.735.264	60%	154.305.309	60	16.46	365%
16	2.15.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	531.144.000	8 Unit	19.386.780	12 Unit	83.285.264	14 Unit	110.255.309	43.75	20.76	211%

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

17	2.15.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	406.168.200	1 Unit	16.800.000	1 Unit	38.450.000	1 Unit	44.050.000	50	10.85	461%
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	237.322.000	0 Potensi	5.680.000	1 Potensi	22.169.339	1 Potensi	22.169.339	100	9.34	1071%
	2.18.02. 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	86.466.000	0%	5.040.000	25%	13.144.739	35%	19.052.939	35	22.04	159%
18	2.18.02. 2.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	36.766.000	0 Dokumen	320	0 Dokumen	7.804.739	0 Dokumen	10.554.739	0	28.71	
19	2.18.02. 2.01.000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	49.700.000	0 Dokumen	4.720.000	1 Dokumen	5.340.000	1 Dokumen	8.498.200	50	17.1	292%
	2.18.02. 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.856.000	0 Dokumen	640	0 Dokumen	9.024.600	0 Dokumen	9.024.600	0	5.98	
20	2.18.02. 2.02.000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Perda	129.906.000	0 Perda	0	0 Perda	4.016.400	0 Perda	4.016.400	0	3.09	
21	2.18.02. 2.02.000 4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.950.000	0 Dokumen	640	0 Dokumen	5.008.200	0 Dokumen	5.008.200	0	23.91	
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	400 Milyar	492.902.900	19 Milyar	1.480.000	42.4 Milyar	56.277.776	45.3 Milyar	56.277.776	11.33	11.42	99%
	2.18.03. 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan	1 Proyek	492.902.900	0 Proyek	1.480.000	1 Proyek	56.277.776	1 Proyek	56.637.776	100	11.49	870%
22	2.18.03. 2.01.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	193.434.500	0 Dokumen	600	0 Dokumen	32.700.000	0 Dokumen	32.700.000	0	16.9	
23	2.18.03. 2.01.000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perda	299.468.400	0 Perda	880	1 Perda	23.577.776	1 Perda	23.937.776	50	7.99	626%
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5	413.362.000	0	36.795.930	90.25	133.671.468	90.25	133.671.468	101.98	32.34	315%
	2.18.04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	413.362.000	100%	36.795.930	100%	133.671.468	100%	188.023.282	100	45.49	220%

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

		yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												
24	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	102.670.000	327 Pelaku Usaha	15.539.600	729 Pelaku Usaha	40.340.430	894 Pelaku Usaha	49.276.030	127.71	47.99	266%
25	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	232.292.000	91 Pelaku Usaha	21.256.330	160 Pelaku Usaha	62.683.240	177 Pelaku Usaha	95.874.240	354	41.27	858%
26	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Pelaku Usaha	78.400.000	278 Pelaku Usaha	0	766 Pelaku Usaha	30.647.798	897 Pelaku Usaha	42.873.012	128.14	54.68	234%
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	90%	570.409.000	0%	13.865.573	0%	93.548.780	34.10%	93.548.780	37.89	16.4	231%
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100	570.409.000	0	13.865.573	0	93.548.780	88	218.386.780	88	38.29	230%
27	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha	286.295.000	35 Pelaku Usaha	12.465.573	189 Pelaku Usaha	66.395.629	211 Pelaku Usaha	178.773.629	117.22	62.44	188%
28	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	284.114.000	0 Kegiatan Usaha	1.400.000	2 Kegiatan Usaha	27.153.151	8 Kegiatan Usaha	39.613.151	32	13.94	230%
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik	100%	212.895.000	90%	8.500.806	200%	43.693.026	200%	43.693.026	200	20.52	975%

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	212.895.000	100%	8.500.806	100%	43.693.026	100%	48.033.026	100	22.56	443%
29	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	13 Data	212.895.000	1 Data	8.500.806	7 Data	43.693.026	8 Data	48.033.026	61.54	22.56	273%
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program			11.639.676.442		1.592.909.377		4.252.070.488		4.252.070.488			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ketiga Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah dan Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi. Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : Nilai Realisasi Investasi dan Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB).

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Balangan s.d Triwulan II (30 Juni 2024)

Sasaran	Indikator	2023	2024			Capaian 2024 terhadap 2026	Keterangan
		Capaian	Target	Realisasi s.d Tw.II	Capaian		
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	78,53%	610 M	371,52 M	60,90%	59,92%	Nilai ini akan dicapai keseluruhan pada akhir tahun anggaran 2024
Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	127,12%	70,5	0	0%	0%	Nilai ini akan rilis pada akhir tahun anggaran 2024

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

1. Untuk indikator pertama Nilai Realisasi Investasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 371,52 Milyar. Jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (2023) dengan realisasi 471,226 Milyar, hal ini sudah lebih dari 50% capaian pada tahun sebelumnya.

2. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi tahun 2024 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2026, maka sudah mencapai angka 59,92%.
3. Melihat dari hasil capaian Nilai Realisasi Investasi triwulan II tahun 2024 yang sudah mencapai 60,90%, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Optimis di akhir tahun mencapai target yang sudah ditetapkan.
4. Untuk indikator sasaran kinerja yang ke dua yaitu Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB), yang mana hasil capaian ini akan rilis pada akhir tahun anggaran 2024. Sedangkan capaian di tahun sebelumnya (2023) sudah mencapai 127,12% dengan realisasi sebesar 88,475.

Analisa Kendala Investasi Daerah

1. Belum tersedianya tata ruang yang selaras dengan kebutuhan berusaha sehingga iklim investasi di daerah tidak optimal.
2. Belum ada Produk Hukum Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
3. Belum Tersedianya dokumen peta potensi investasi wilayah sehingga sulitnya melakukan investasi berbasis peta potensi wilayah di Kabupaten Balangan.
4. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya.
5. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

1. Mengajukan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

2. Mengadakan rapat koordinasi peningkatan iklim investasi di daerah serta evaluasi peningkatan realisasi investasi.
3. Penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang RDTR.
4. Menyediakan IPRO (Investment Project Ready to Offer).
5. Menyusun Peta Potensi Investasi dan membangun sistem informasi hasil pemetaan potensi.
6. Menyediakan Potensi investasi daerah yang berhasil menarik investor
7. Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM bagi pelaku usaha.
8. Melaksanakan sosialisasi kebijakan berusaha dan kiat-kiat berinvestasi bagi para pelaku usaha.
9. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.
10. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memohon perizinan berusaha.
11. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha dan DPMPTSP melalui kanal media sosial sehingga informasi terkait investasi/penanaman modal dapat dikomunikasikan dengan cepat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel TC-30 :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi	400 M	600 M	610 M	615 M		471,226 M	610 M	615 M	
2	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)		Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)		69,6	70,5	71		88,48	70,5	71	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Balangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan

industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah :

1. Investasi saat ini mengarah ke II sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). keII sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
2. Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi).
3. Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing.
4. Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
5. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat.

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

RKPD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024, merupakan tahun ke empat RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RKPD Perubahan Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Bertambah/ Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Balangan	Nilai SAKIP SKPD	72 (BB) Nilai	9,712,785,542.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Balangan	Nilai SAKIP SKPD	72 (BB) Nilai	9,747,275,042.00	34,489,500.00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	250,925,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	265,087,000.00	14,162,000.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58,740,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	69,502,000.00	10,762,000.00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	31,755,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	31,755,000.00	0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	160,430,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	163,830,000.00	3,400,000.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6,390,783,242.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	5,521,513,642.00	- 869,269,600.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /Bulan	4,729,116,682.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	4,861,167,082.00	132,050,400.00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,576,117,560.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	576,047,560.00	- 1,000,070,000.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	49,127,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	49,127,000.00	0.00
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	36,422,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	35,172,000.00	-1,250,000.00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	455,262,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	442,762,000.00	-12,500,000.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	161,462,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	183,962,000.00	22,500,000.00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	293,800,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	258,800,000.00	-35,000,000.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	749,680,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1,699,415,800.00	949,735,400.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43,940,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43,940,000.00	0.00
2					-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Unit	840,058,400.00	840,058,400.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73,402,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	86,862,000.00	13,460,000.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,118,400.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,118,400.00	0.00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	622,220,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	718,437,000.00	96,217,000.00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	243,190,500.00	243,190,500.00
1						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	126,000,000.00	126,000,000.00
2						Pengadaan Mebel	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	117,190,500.00	117,190,500.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	928,822,700.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	590,615,100.00	-338,207,600.00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371,481,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228,548,400.00	-142,932,600.00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557,341,700.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	362,066,700.00	-195,275,000.00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	937,312,200.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	984,691,000.00	47,378,800.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	531,144,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	491,754,000.00	-39,390,000.00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	406,168,200.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	492,937,000.00	86,768,800.00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Jumlah sektor potensi investasi baru	1 potensi	237,322,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Jumlah sektor potensi investasi baru	1 potensi	320,622,000.00	83,300,000.00
I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Kabupaten Balangan	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	86,466,000.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Kabupaten Balangan	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	69,766,000.00	-16,700,000.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	36,766,000.00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	38,766,000.00	2,000,000.00
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	49,700,000.00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	31,000,000.00	-18,700,000.00
II	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Potensi	150,856,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Potensi	250,856,000.00	100,000,000.00
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129,906,000.00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129,906,000.00	0.00
2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,950,000.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120,950,000.00	100,000,000.00
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	220 M	492,902,900.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	220 M	521,783,700.00	28,880,800.00
I	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan	2 Proyek	492,902,900.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan	2 Proyek	521,783,700.00	28,880,800.00
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Laporan	193,434,500.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	219,565,300.00	26,130,800.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	299,468,400.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	302,218,400.00	2,750,000.00
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88,5 BB	413,362,000.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90 BB	822,511,620.00	409,149,620.00
I	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	413,362,000.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	822,511,620.00	409,149,620.00
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	102,670,000.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	393,645,420.00	290,975,420.00
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	232,292,000.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	175 Pelaku Usaha	229,342,000.00	-2,950,000.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Pelaku Usaha	78,400,000.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Kegiatan Usaha	199,524,200.00	121,124,200.00
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	570,409,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	661,209,000.00	90,800,000.00
I	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	570,409,000.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	661,209,000.00	90,800,000.00
1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha	286,295,000.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	313,495,000.00	27,200,000.00
2	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	25 Pelaku Usaha	284,114,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	25 Kegiatan Usaha	347,714,000.00	63,600,000.00

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

			Berusaha					Berusaha			
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100 %	212,895,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100 %	147,695,000.00	-65,200,000.00
I	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	212,895,000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	147,695,000.00	-65,200,000.00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	13 Data	212,895,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	13 Dokumen	147,695,000.00	-65,200,000.00
	TOTAL PAGU				11,639,676,442.00					12,221,096,362.00	581,419,920.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Sinergitas Kebijakan Daerah

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dikerja dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan.Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan

perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Permendagri No 40 Tahun 2020

Prioritas Bidang Pembangunan Nasional

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam penerapan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan

dengan indikator tujuan : Persentase peningkatan investasi daerah dan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 15%.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan realisasi investasi daerah;

dengan indikator sasaran : Nilai realisasi investasi

2. Meningkatnya kemudahan berinvestasi

dengan indikator sasaran : Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB)

Target Pembangunan Nasional

- a. Nilai realisasi penanaman modal Rp 991,3 triliun;
- b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
- c. Perusahaan besar yang bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah :
120 perusahaan;
- d. Sebaran penanaman modal yang berkualitas (di luar Jawa) : 46,9%;
- e. Nilai komitmen hasil promosi investasi terfokus sektor dan negara : Rp
1.652,2 triliun;
- f. Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk usaha mikro, kecil
menengah; 47,8 %;
- g. Peringkat kemudahan berusaha: 55 (Peringkat EoDB).

Hal – Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD Perubahan 2024

- a. Pengawasan realisasi investasi di daerah.
- b. Perlunya hilirisasi sumber daya alam di daerah.
- c. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional
khususnya usaha mikro, kecil menengah di daerah proyek.
- d. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.
- e. Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- f. Promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan yang sejalan dengan
prioritas nasional.
- g. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya usaha
mikro, kecil menengah.
- h. Penyederhanaan Perizinan di daerah.

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan
memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “perantara/calor” dalam pengurusan perizinan dan non
perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada

masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.

3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah mudah cepat dan transparan serta tanggapan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Balangan. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan kompetensi integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan di tahun 2024 adalah melanjutkan visi dan misi dari kepala daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumberdaya manusia ,melalui misi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sehingga dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan tersebut lebih difokuskan pada penajaman IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah berupa peningkatan investasi daerah.

Pada Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 6 program, 13 kegiatan yang terdiri dari 32 Sub Kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Mebel

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

- 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 2) Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Renja Perubahan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 adalah program/ kegiatan yang benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Perubahan Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaIn dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaIn dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengkomodir usulam masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini :

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU				KET.
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	72 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	72 (BB) Nilai	9,578,459,476.00	9,712,785,542.00	9,747,275,042.00	34,489,500.00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	100%	250,925,000.00	250,925,000.00	265,087,000.00	14,162,000.00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	58,740,000.00	58,740,000.00	69,502,000.00	10,762,000.00	
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31,755,000.00	31,755,000.00	31,755,000.00	-	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	160,430,000.00	160,430,000.00	163,830,000.00	3,400,000.00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	6,390,783,242.00	6,390,783,242.00	5,521,513,642.00	(869,269,600.00)	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	4,729,116,682.00	4,729,116,682.00	4,861,167,082.00	132,050,400.00	
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,576,117,560.00	1,576,117,560.00	576,047,560.00	(1,000,070,000.00)	
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,127,000.00	49,127,000.00	49,127,000.00	-	

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36,422,000.00	36,422,000.00	35,172,000.00	(1,250,000.00)	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	455,262,000.00	455,262,000.00	442,762,000.00	(12,500,000.00)	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	160 Paket	160 Paket	161,462,000.00	161,462,000.00	183,962,000.00	22,500,000.00	
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	293,800,000.00	293,800,000.00	258,800,000.00	(35,000,000.00)	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	749,680,400.00	749,680,400.00	1,699,415,800.00	949,735,400.00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	43,940,000.00	43,940,000.00	43,940,000.00	-	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			40 Unit	-	-	840,058,400.00	840,058,400.00	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	10,118,400.00	10,118,400.00	86,862,000.00	76,743,600.00	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	73,402,000.00	73,402,000.00	10,118,400.00	(63,283,600.00)	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	260 Laporan	260 Laporan	622,220,000.00	622,220,000.00	718,437,000.00	96,217,000.00	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	-	-	243,190,500.00	243,190,500.00	
	2.18.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit			126,000,000.00	126,000,000.00	
	2.18.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit			117,190,500.00	117,190,500.00	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	100%	100%	928,822,700.00	928,822,700.00	590,615,100.00	(338,207,600.00)	

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	371,481,000.00	371,481,000.00	228,548,400.00	(142,932,600.00)	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	557,341,700.00	557,341,700.00	362,066,700.00	(195,275,000.00)	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	937,312,200.00	937,312,200.00	984,691,000.00	47,378,800.00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	32 Unit	531,144,000.00	531,144,000.00	491,754,000.00	(39,390,000.00)	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	406,168,200.00	406,168,200.00	492,937,000.00	86,768,800.00	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah sektor potensi investasi baru	Jumlah sektor potensi investasi baru	1 Potensi	1 Potensi	1 Potensi	237,322,000.00	237,322,000.00	320,622,000.00	83,300,000.00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	100%	100%	86,466,000.00	86,466,000.00	69,766,000.00	(16,700,000.00)	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36,766,000.00	36,766,000.00	38,766,000.00	2,000,000.00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	49,700,000.00	49,700,000.00	31,000,000.00	(18,700,000.00)	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Potensi	1 Potensi	1 Potensi	150,856,000.00	150,856,000.00	250,856,000.00	100,000,000.00	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	129,906,000.00	129,906,000.00	129,906,000.00	-	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,950,000.00	20,950,000.00	120,950,000.00	100,000,000.00	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	220 M	220 M	220 M	492,902,900.00	492,902,900.00	521,783,700.00	28,880,800.00	

Renja Perubahan 2024 DPMPTSP
Kabupaten Balangan

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan	Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan	2 Proyek	2 Proyek	2 Proyek	492,902,900.00	492,902,900.00	521,783,700.00	28,880,800.00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	299,468,400.00	299,468,400.00	219,565,300.00	(79,903,100.00)	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	193,434,500.00	193,434,500.00	302,218,400.00	108,783,900.00	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88,5 BB	88,5 BB	90 BB	413,362,000.00	413,362,000.00	822,511,620.00	409,149,620.00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	100%	413,362,000.00	413,362,000.00	822,511,620.00	409,149,620.00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	102,670,000.00	102,670,000.00	393,645,420.00	290,975,420.00	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	175 Pelaku Usaha	78,400,000.00	78,400,000.00	229,342,000.00	150,942,000.00	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Kegiatan Usaha	700 Kegiatan Usaha	700 Kegiatan Usaha	232,292,000.00	232,292,000.00	199,524,200.00	(32,767,800.00)	
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Persentase Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	90 %	90 %	165,448,000.00	570,409,000.00	661,209,000.00	90,800,000.00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	165,448,000.00	570,409,000.00	661,209,000.00	90,800,000.00	

Renja Perubahan 2024 DPMPSTP
Kabupaten Balangan

		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota										
	2.18.05.2. 01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha	180 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	63,566,000.00	286,295,000.00	313,495,000.00	27,200,000.00	
	2.18.05.2. 01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	101,882,000.00	284,114,000.00	347,714,000.00	63,600,000.00	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal secara elektronik	Persentase data dan informasi penanaman modal secara elektronik	100 %	100 %	100 %	212,895,000.00	212,895,000.00	147,695,000.00	(65,200,000.00)	
	2.18.06.2. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	100%	100%	212,895,000.00	212,895,000.00	147,695,000.00	360,590,000.00	
	2.18.06.2. 01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	212,895,000.00	212,895,000.00	147,695,000.00	(65,200,000.00)	
TOTAL PAGU									11,100,389,376.00	11,639,676,442.00	12,221,096,362.00	581,419,920.00	

BAB V

PENUTUP

Di dalam Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Balangan telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 sampai dengan triwulan II serta Renja tahun 2024.

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024. Renja Perubahan ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7				8				9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75 Nilai	58.642.470.824	70.6 Nilai	11.658.042.390	72 Nilai	9.712.785.542	0 Nilai	1.526.587.068	0 Nilai	3.902.710.099					0 Nilai	3.902.710.099	0	40.18			15.560.752.489			26.53				
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	420.447.895	100%	89.057.242	100%	250.925.000	25%	29.933.092	50%	100.909.241					60%	111.821.241	60	44.56	60%		200.878.483	60	47.78			135%		
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	75.717.500	2 Dokumen	22.390.409	2 Dokumen	58.740.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	24.141.980					1 Dokumen	27.556.980	50	46.91	3 Dokumen		49.947.389	30	65.97			107%		
2	2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	61.106.925	1 Dokumen	16.893.000	2 Dokumen	31.755.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.745.000					1 Dokumen	8.745.000	50	27.54	2 Dokumen		25.638.000	20	41.96			182%		
3	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	283.623.470	2 Laporan	49.773.833	4 Laporan	160.430.000	1 Laporan	29.933.092	2 Laporan	68.022.261					2 Laporan	75.519.261	50	47.07	4 Laporan		125.293.094	33.33	44.18			106%		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50	40.51			27.78	50.7								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah								
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	48.130.684.109	100%	8.517.845.711	100%	6.390.783.242	25%	1.325.437.557	50%	3.100.672.522					60%	3.486.565.634	60	54.56	60%		12.004.411.345	60	24.94			110%		
4	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	46.173.496.862	42 Orang/Bulan	7.066.075.394	50 Orang/Bulan	4.729.116.682	16 Orang/Bulan	1.171.812.037	16 Orang/Bulan	2.770.257.174					16 Orang/Bulan	3.096.628.426	32	65.48	16 Orang/Bulan		10.162.703.820	32	22.01			49%		
5	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.879.440.547	12 Dokumen	1.376.084.317	12 Dokumen	1.576.117.560	3 Dokumen	144.435.520	6 Dokumen	315.328.948					7 Dokumen	369.925.808	58.33	23.47	7 Dokumen		1.746.010.125	11.67	92.9			249%		
6	2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	45.132.229	1 Dokumen	34.463.800	1 Dokumen	49.127.000	0 Dokumen	9.190.000	0 Dokumen	15.086.400					0 Dokumen	18.571.400	0	37.8	1 Dokumen		53.035.200	33.33	117.51					
7	2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	32.614.471	1 Dokumen	41.222.200	2 Dokumen	36.422.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					1 Dokumen	1.440.000	50	3.95	2 Dokumen		42.662.200	33.33	130.81			1266%		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		35.08	32.68			27.58	90.81								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi								
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.292.534.702	100%	327.373.600	100%	455.262.000	25%	0	50%	104.495.810					60%	104.495.810	60	22.95	60%		431.869.410	60	33.41			261%		
8	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	480 Paket	279.788.046	50 Paket	158.683.200	160 Paket	161.462.000	0 Paket	0	100 Paket	88.900.000					100 Paket	88.900.000	62.5	55.06	150 Paket		247.583.200	31.25	88.49			114%		
9	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	1.012.746.656	44 Orang	168.690.400	45 Orang	293.800.000	0 Orang	0	2 Orang	15.595.810					2 Orang	15.595.810	4.44	5.31	46 Orang		184.286.210	34.07	18.2			84%		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33.47	30.19			32.66	53.35								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah								
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.823.746.932	100%	725.149.723	100%	749.680.400	25%	82.079.330	50%	217.233.912					60%	267.442.612	60	35.67	60%		992.592.335	60	54.43			168%		
10	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	133.673.497	1 Paket	45.639.100	12 Paket	43.940.000	0 Paket	0	4 Paket	12.559.500					4 Paket	12.559.500	33.33	28.58	5 Paket		58.198.600	13.89	43.54			117%		
11	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	242.175.477	1 Paket	74.244.700	12 Paket	73.402.000	0 Paket	0	4 Paket	22.252.800					4 Paket	22.252.800	33.33	30.32	5 Paket		96.497.500	13.89	39.85			110%		
12	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	26.110.400	1 Dokumen	19.866.300	12 Dokumen	10.118.400	0 Dokumen	0	5 Dokumen	2.950.000					5 Dokumen	2.950.000	41.67	29.15	6 Dokumen		22.816.300	16.67	87.38			143%		
13	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.421.787.558	75 Laporan	585.399.623	260 Laporan	622.220.000	40 Laporan	82.079.330	75 Laporan	179.471.612					171 Laporan	229.680.312	65.77	36.91	246 Laporan		815.079.935	41	57.33			178%		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		43.53	31.24			21.36	57.03								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi								

2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	4.339.973.704	100%	880.570.973	100%	928.822.700	25%	52.950.309	50%	257.663.350					60%	285.451.405	60	30.73	60%	1.166.022.378	60	26.87		195%
14	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	2.377.165.455	12 Laporan	373.903.873	12 Laporan	371.481.000	3 Laporan	40.650.309	6 Laporan	90.204.650				7 Laporan	107.472.705	58.33	28.93	19 Laporan	481.376.578	52.78	20.25		202%
15	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.962.808.249	12 Laporan	506.667.100	12 Laporan	557.341.700	3 Laporan	12.300.000	6 Laporan	167.458.700				7 Laporan	177.978.700	58.33	31.93	19 Laporan	684.645.800	52.78	34.88		183%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			58.33	30.43			52.78	27.57		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	2.635.083.482	100%	1.118.045.141	100%	937.312.200	25%	36.186.780	50%	121.735.264					60%	154.305.309	60	16.46	60%	1.272.350.450	60	48.29		365%
16	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	2.055.726.088	33 Unit	375.717.363	32 Unit	531.144.000	8 Unit	19.386.780	12 Unit	83.285.264				14 Unit	110.255.309	43.75	20.76	14 Unit	485.972.672	40	23.64		211%
17	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	579.357.394	2 Unit	742.327.778	2 Unit	406.168.200	1 Unit	16.800.000	1 Unit	38.450.000				1 Unit	44.050.000	50	10.85	1 Unit	786.377.778	50	135.73		461%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			46.88	15.81			45	79.89		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			60	34.16			60	39.29		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																			Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah		
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	5 Potensi	1.185.690.307	1 Potensi	118.033.200	1 Potensi	237.322.000	0 Potensi	5.680.000	1 Potensi	22.169.339				1 Potensi	22.169.339	100	9.34	1 Potensi	140.202.539	20	11.82		1071%
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiayai Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	512.424.831	0%	0	100%	86.466.000	0%	5.040.000	25%	13.144.739				35%	19.052.939	35	22.04	35%	19.052.939	35	3.72		159%
18	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 Dokumen	280.374.831	0 Dokumen	0	1 Dokumen	36.786.000	0 Dokumen	320	0 Dokumen	7.804.739				0 Dokumen	10.554.739	0	28.71		10.554.739		3.76		
19	2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMND) dengan UMKM di daerah	6 Dokumen	232.050.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	49.700.000	0 Dokumen	4.720.000	1 Dokumen	5.340.000				1 Dokumen	8.498.200	50	17.1	1 Dokumen	8.498.200	16.67	3.66		292%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			25	22.91			16.67	3.71		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Dokumen	673.265.476	1 Dokumen	118.033.200	1 Dokumen	150.856.000	0 Dokumen	640	0 Dokumen	9.024.600				0 Dokumen	9.024.600	0	5.98		127.057.800		18.87			
20	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Perda	294.863.750	0 Perda	0	1 Perda	129.906.000	0 Perda	0	0 Perda	4.016.400				0 Perda	4.016.400	0	3.09		4.016.400		1.36		
21	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6 Dokumen	378.401.726	1 Dokumen	118.033.200	1 Dokumen	20.950.000	0 Dokumen	640	0 Dokumen	5.008.200				0 Dokumen	5.008.200	0	23.91		123.041.400		32.52		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			0	13.5			0	16.94		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			17.5	14.01			35	11.3		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	700 Milyar	728.200.000	447 Milyar	3.437.896.150	400 Milyar	492.902.900	19 Milyar	1.480.000	42.4 Milyar	56.277.776				45.3 Milyar	56.277.776	11.33	11.42	492.3 Milyar	3.494.173.926	70.33	479.84		99%
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan	3 Proyek	728.200.000	2 Proyek	3.437.896.150	1 Proyek	492.902.900	0 Proyek	1.480.000	1 Proyek	56.277.776				1 Proyek	56.637.776	100	11.49	3 Proyek	3.494.533.926	100	479.89		870%
22	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	397.200.000	2 Dokumen	3.314.063.970	1 Dokumen	193.434.500	0 Dokumen	600	0 Dokumen	32.700.000				0 Dokumen	32.700.000	0	16.9		3.346.763.970		842.59		
23	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perda	331.000.000	1 Perda	123.832.180	2 Perda	299.468.400	0 Perda	880	1 Perda	23.577.776				1 Perda	23.937.776	50	7.99	2 Perda	147.769.956	100	44.64		626%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			25	12.45			100	443.62		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			100	11.49			100	479.89		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	89.5	1.435.341.464	92.25	551.140.099	88.5	413.362.000	0	36.795.930	90.25	133.671.468					90.25	133.671.468	101.98	32.34	90.25	684.811.567	100.84	47.71		315%																						
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	1.435.341.464	100%	551.140.099	100%	413.362.000	100%	36.795.930	100%	133.671.468					100%	188.023.282	100	45.49	100%	739.163.381	100	51.5		220%																						
24	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	612.000.000	572 Pelaku Usaha	198.768.709	700 Pelaku Usaha	102.670.000	327 Pelaku Usaha	15.539.600	729 Pelaku Usaha	40.340.430					894 Pelaku Usaha	49.276.030	127.71	47.99	894 Pelaku Usaha	248.044.739	29.8	40.53		266%																						
25	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	632.591.365	78 Pelaku Usaha	333.114.990	50 Pelaku Usaha	232.292.000	91 Pelaku Usaha	21.256.330	160 Pelaku Usaha	62.683.240					177 Pelaku Usaha	95.874.240	354	41.27	255 Pelaku Usaha	428.989.230	51	67.81		858%																						
26	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	4000 Pelaku Usaha	190.750.099	572 Pelaku Usaha	19.256.400	700 Pelaku Usaha	78.400.000	278 Pelaku Usaha	0	766 Pelaku Usaha	30.647.798					897 Pelaku Usaha	42.873.012	128.14	54.68	897 Pelaku Usaha	62.129.412	22.43	32.57		234%																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				203.28	47.98			34.41	46.97																								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Rendah																								
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																				100	45.49			100	51.5																								
Predikat Kinerja (Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah																								
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	100%	280.032.951	100%	384.027.966	90%	570.409.000	0%	13.865.573	0%	93.548.780					34.10%	93.548.780	37.89	16.4	34.10%	477.576.746	34.1	170.54		231%																						
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100	280.032.951	100	384.027.966	100	570.409.000	0	13.865.573	0	93.548.780					88	218.386.780	88	38.29	88	602.414.746	88	215.12		230%																						
27	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600 Pelaku Usaha	126.153.368	323 Pelaku Usaha	283.021.851	180 Pelaku Usaha	286.295.000	35 Pelaku Usaha	12.465.573	189 Pelaku Usaha	66.395.629					211 Pelaku Usaha	178.773.629	117.22	62.44	211 Pelaku Usaha	461.795.480	35.17	366.06		188%																						
28	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha	153.879.583	41 Kegiatan Usaha	101.006.115	25 Kegiatan Usaha	284.114.000	0 Kegiatan Usaha	1.400.000	2 Kegiatan Usaha	27.153.151					8 Kegiatan Usaha	39.613.151	32	13.94	8 Kegiatan Usaha	140.619.266	5.33	91.38		230%																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																				74.61	38.19			20.25	228.72																								
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi																								
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																				88	38.29			88	215.12																								
Predikat Kinerja (Kegiatan)																				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																								
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik	100%	810.737.720	100%	401.328.145	100%	212.895.000	90%	8.500.806	200%	43.693.026					200%	43.693.026	200	20.52	200%	445.021.171	200	54.89		975%																						
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	100%	810.737.720	100%	401.328.145	100%	212.895.000	100%	8.500.806	100%	43.693.026					100%	48.033.026	100	22.56	100%	449.361.171	100	55.43		443%																						
29	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	30 Data	810.737.720	6 Data	401.328.145	13 Data	212.895.000	1 Data	8.500.806	7 Data	43.693.026					8 Data	48.033.026	61.54	22.56	14 Data	449.361.171	46.67	55.43		273%																						

Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	61.54	22.56			46.67	55.43		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	22.56			100	55.43		
Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)	75.2	21.7			85.05	131.89		
Predikat Kinerja (Seluruh Program)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)	65.25	22.23			71.16	86.35		
Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	67.32	30.02			33.88	91.27		
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
Jumlah Anggaran dari seluruh Program	11.639.676.442	1.592.909.377	4.252.070.488			4.252.070.488		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Dukungan stakeholder terkait dalam proses pelaksanaan MPP Digital Bidang Kesehatan 2. Pelaku usaha (Kecil dan Menengah) aktif dalam menyampaikan LKPM							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Panjangnya alur birokrasi untuk mewujudkan MPP Digital Bidang Kesehatan 2. Pelaku Usaha tidak menyampaikan Nilai Investasinya sebagaimana realisasi sebenarnya							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam	1. Menyusun Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi secara berkala 2. Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bersama Tim Teknis							



Tanggal 01 Agustus 2024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

H. RAKHMADYUSNI, S.SOS, MAP
NP. 197012071995031002

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

Pada hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Aula I Bapperida Kabupaten Balangan**, telah diselenggarakan Forum SKPD **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu** yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Paparan Pra RKA Perubahan SKPD Tahun 2024 beserta Indikator dan Target Kinerja SKPD
2. Tanggapan, saran dan masukan serta hasil diskusi oleh SKPD bersama Tim Penyusun RKPD Kabupaten Balangan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : **Senin 27 Mei 2024**
Jam : **14.00 WITA sampai selesai**
Tempat : **Aula I Bapperida Kabupaten Balangan**

Seluruh peserta Forum SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Tim Penyusun RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024 :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- KEDUA** : Menyepakati hasil penyesuaian dan penajaman Asistensi Pra RKA Perubahan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi RKPD Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam matriks Renja pada LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I dan II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Menyepakati Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

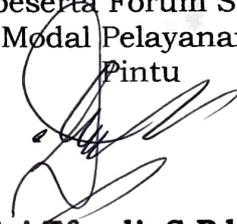
Paringin, tanggal 27 Mei 2024

a.n. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
dan Infrastruktur selaku Pimpinan Sidang,
Perencana Ahli Muda



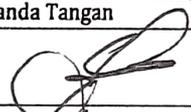
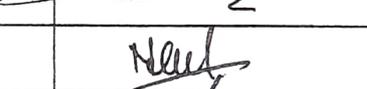
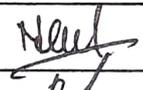
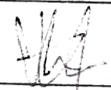
Mukarramah, S.Hut. MM
NIP. 19820214 201001 2 002

Mewakili dan Menyetujui
selaku peserta Forum SKPD Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu



Fitri Efendi, S.Pd, M.M
NIP. 19890510 201503 1 001

LAMPIRAN I : DAFTAR HADIR VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2024.

NO	Nama / NIP	Jabatan	SKPD	Tanda Tangan
1	Dr. Agus Muslim, M.E	Setnestan?	DPMPD	
2	RITRI ETENDI	Kasubag	- " -	
3	Bardimah	DFAK	"	
4	ERMAWATI	Jf	- " -	
5	Paymansyah	Staf	- " -	
6	Noviawati	Staf	- " -	
7	EMILIA M. Afifah, S. Sat	Staf	- " -	
8	Rizqi Anisa		- " -	
9	Mukarramah	Jf Perencana	Buaperida	
10	Riana Ayu Ningsih	Jf Perencana	Buaperida	
11	Aulia Azizah	Staf	- " -	
12	M. Khairillah	Staf	- " -	
13	Taufik Rahman	- " -	- " -	
14	Diana Ulfah	- " -	- " -	
15	Ria Hidayanti	- " -	- " -	
16	Siti Syahila Rahmah	- " -	- " -	
17	Vira Hafsari	- " -	- " -	
18	M. Rizal	Staf	Buaperida	
19				
20				

LAMPIRAN II : HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

Hasil pembahasan dan klarifikasi terhadap Dokumen Rancangan Perubahan Renja PD dengan beberapa catatan :

- Untuk Gaji THL yang semula disekretariat dipindahkan ke bidang bidang teknis menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
- Pengadaan pakaian sasirangan berkurang karena sebelum nya mengakomodir dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan menambah di perubahan untuk pengadaan PDH Putih Hitam sebanyak 60 stel.
- Untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.150.077.600,- perlu penyesuaian standar satuan harga seperti pengadaan mesin printer DTG berdasarkan hasil analisis mesin printer tersebut digunakan untuk cetak sablon untuk pembelian peralatan kantor diharapkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan si pengguna barang tersebut.
- Untuk pengadaan mobil dan kendaraan dinas agar dibuatkan telaahan staf pada tahun 2023 kendaraan dinas sudah teranggarkan 5 buah terdiri dari 3 buah untuk PTSP & 2 buah dinas KUKMTK.
- Untuk kebutuhan belanja listrik,internet dan THL mengalami pengurangan karena anggaran yang sudah ada mengakomodir gabungan SKPD sebelum nya.
- Pemberian makan dan minum untuk petugas pelayanan jika ada juknis nya silakan dikonsultasikan dengan Inspektorat dan BPKPAD.
- Penambahan biaya bintek untuk Biaya Diklat Service Excellent sebanyak 60 orang Rp. 300.000.000,-
- Belanja bimtek persetujuan bangunan gedung bagi aparat desa se Kabupaten Balangan sebanyak 100 orang Rp. 500.000.000,-
- Untuk pengadaan billboard harga sesuaikan SSH
- Kegiatan Peta Potensi/Peluang Investasi (turunan/lanjutan) yaitu Peta potensi secara umum untuk satu kecamatan di ambil satu dokumen kajian
- Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yaitu Batutukar, Perizinan, Pengaduan, Investasi dan agar dituliskan dalam rincian penyusunan RKA untuk data dukung inovasi
- Sesuai dengan Hasil Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Balangan nomor PE.09.03/LHP-98/PW16/3/2022 untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran belanja memperhatikan seperti :
 - Anggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan substansi sub kegiatan
 - Rincian anggaran belanja yang lebih tinggi daripada harga pada SSH agar disesuaikan
 - Rincian anggaran belanja yang tidak berkontribusi signifikan pada capaian sasaran pembangunan seperti pengadaan PDL, baju kaos panitia
 - Rincian anggaran belanja yang tidak sesuai dengan maksud sub kegiatan (tidak sesuai antara isi sub kegiatan dan indikator sub kegiatan)
 - Tidak terdapat rincian belanja yang jelas (RAB) dan bentuknya masih paket

**REKAPITULASI PERHITUNGAN KEBUTUHAN SKPD
DALAM PENYUSUNAN PRA-RKA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024**

SKPD : DPMPTSP
IKU 1. Meningkatnya Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kemudahan Berusaha

No.	Uraian Belanja Langsung Rutin	Anggaran Murni	Realisasi s.d 21 Mei 2024	Data Dasar/ Kebutuhan Perubahan				Bertambah/ Berkurang	ANALISIS	ANALISIS II	ANALISIS III
				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	6		3	4	5	6	6			
1.1	Belanja Pegawai	4.729.116.682	2.037.247.650	1	Tahun	4.851.652.282	4.851.652.282	122.535.600	122.535.600	200.000.000	200.000.000
1	Gaji dan tunjangan ASN	4.729.116.682	2.037.247.650	1	Tahun	4.851.652.282	4.851.652.282	122.535.600	122.535.600	200.000.000	200.000.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.489.061.960					1.025.070.960	(1.463.991.000)	1.463.991.000	1.463.991.000	1.463.991.000
1	Kebutuhan Listrik untuk 1 Tahun	288.840.000	47.647.111	1	Tahun	150.000.000	150.000.000	(138.840.000)	138.840.000	138.840.000	138.840.000
2	Kebutuhan Internet untuk 1 Tahun	57.141.000	22.878.100	1	Tahun	63.600.000	63.600.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000
3	Kebutuhan Air untuk 1 Tahun	25.500.000	2.314.500	1	Tahun	6.690.000	6.690.000	(18.810.000)	18.810.000	18.810.000	18.810.000
4	Tenaga Administrasi	1.518.000.000	237.100.000	1	Tahun	594.000.000	594.000.000	(924.000.000)	924.000.000	924.000.000	924.000.000
5	Tenaga Keamanan	303.600.000	28.000.000	1	Tahun	67.200.000	67.200.000	(236.400.000)	236.400.000	236.400.000	236.400.000
6	Tenaga Kebersihan	211.200.000	20.500.000	1	Tahun	67.200.000	67.200.000	(144.000.000)	144.000.000	144.000.000	144.000.000
7	Supir	31.200.000	9.500.000	1	Tahun	22.800.000	22.800.000	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	8.400.000
8	Operator Genset	33.600.000		1	Tahun	33.600.000	33.600.000	-	-	-	-
9	JKK JKM	9.862.560	1.289.860	1	Tahun	9.862.560	9.862.560	-	-	-	-
10	Langganan Koran	10.118.400		1	Tahun	10.118.400	10.118.400	-	-	-	-
I	Jumlah	Rp 7.218.178.642					Rp 5.876.723.242	-Rp 1.341.455.400	-Rp 1.341.455.400	-Rp 1.263.991.000	- 1.263.991.000
No.	URAIAN BELANJA OPERASIONAL NON RUTIN SKPD /Penunjang	Anggaran Murni		Data Dasar/ Kebutuhan Perubahan				Bertambah/ Berkurang		ANALISIS II	ANALISIS II
1	2	6		3	4	5	6	6	6		
2.1	Belanja Barang dan Jasa	2.109.877.900		1	Tahun		2.406.002.900	260.625.000	197.625.000	145.300.000	145.300.000
1	Belanja Suku Cadang Mobil Dinas	126.519.000	1.602.199	1	Tahun	126.519.000	126.519.000	-	-	-	-
2	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	152.905.000	32.571.865	1	Tahun	152.905.000	152.905.000	-	-	-	-
3	Pemeliharaan Mobil Dinas	192.520.000	1.025.000	1	Tahun	192.520.000	192.520.000	-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan	28.000.000	1.821.200	1	Tahun	28.000.000	28.000.000	-	-	-	-
5	Bahan Kebersihan	69.845.500		1	Tahun	69.845.500	69.845.500	-	-	-	-
6	ATK	80.864.700	12.999.000	1	Tahun	80.864.700	80.864.700	-	-	-	-
7	Materai	10.000.000	5.000.000	1	Tahun	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
8	Bahan Komputer	42.181.000	2.847.800	1	Tahun	42.181.000	42.181.000	-	-	-	-
9	Natura	4.883.700		1	Tahun	4.883.700	4.883.700	-	-	-	-
10	Service Videotron	70.000.000		1	Tahun	-	-	-70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
11	Service AC	21.960.000	9.900.000	1	Tahun	21.960.000	21.960.000	-	-	-	-
12	Service CCTV	14.356.800		1	Tahun	14.356.800	14.356.800	-	-	-	-
13	Service Laptop dan Printer	32.050.000		1	Tahun	32.050.000	32.050.000	-	-	-	-
14	Bahan Bakar dan Suku Cadang Genset	33.018.200		1	Tahun	33.018.200	33.018.200	-	-	-	-

15	Servis Genset	35.950.000	4.850.000	1	Tahun	35.950.000	35.950.000	-	-	-	-
16	Makmin Rapat dan Tamu	77.000.000	38.570.000	1	Tahun	77.000.000	77.000.000	-	-	-	-
17	Perjalanan Dinas	545.220.000	110.851.930	1	Tahun	795.220.000	795.220.000	250.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
18	Belanja Cetak	73.402.000	6.331.800	1	Tahun	108.902.000	108.902.000				
19	Komponen Listrik	43.940.000	5.492.000	1	Tahun	43.940.000	43.940.000	-	-	-	-
20	Makmin Rapat	-		600	Porsi	55.000	33.000.000	33.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	Instruktur Senam	-		8	kali	600.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
22	Penceramah	-		8	kali	500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23	Bimtek	293.800.000	7.251.700	1	Tahun	293.800.000	293.800.000	-	-	-	-
24	Sasrirangan Hari Jadi	38.612.000	14.200.000	1	Tahun	25.112.000	25.112.000	-	13.500.000	-	13.500.000
25	Baju PDH	44.850.000	42.000.000	130	stel	747.500	97.175.000	52.325.000	52.325.000	-	-
26	Baju PDL	45.000.000		1	tahun	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-
27	Seragam Olahraga	33.000.000		1	Paket	33.000.000	33.000.000	-	-	-	-
2.2	Belanja Modal			1	Tahun	1.743.938.500	1.778.138.000	1.185.894.400	279.988.100	279.988.100	
28	Ac Standing 5 PK	-		1	BUAH	30.871.700	30.871.700	30.871.700	30.871.700	-	-
29	Ac Standing 5 PK	-		1	BUAH	10.800.500	10.800.500	45.000.000	10.800.500	10.800.500	10.800.500
30	Belanja Kipas Angin	-		3	BUAH	2.016.400	6.049.200	6.049.200	2.016.400	2.016.400	2.016.400
31	Sound System Rapat			1	BUAH	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	-	-
32	Speaker Aktif HARDWELL DIGITAL 15 PRO			1	Buah	9.005.200	9.005.200	9.005.200	-	-	-
33	microphone wireless			1	Set	500.000	500.000	500.000	500.000	-	-
34	Peralatan Zoom Dan Podcast			1	Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-
35	Laptop/Notebook			14	BUAH	29.594.900	414.328.600	414.328.600	266.354.100	100.000.000	100.000.000
36	Computer/PC All In One			1	BUAH	31.976.900	31.976.900	31.976.900	31.976.900	31.976.900	31.976.900
37	Printer DTG			4	BUAH	22.168.400	88.673.600	88.673.600	-	-	-
38	Printer			5	BUAH	8.808.000	44.040.000	44.040.000	17.616.000	17.616.000	17.616.000
40	TV			1	unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-
43	Rak Besi			4	BUAH	2.392.700	9.570.800	9.570.800	9.570.800	9.570.800	9.570.800
44	Meja			3	Unit	4.050.500	12.151.500	12.151.500	12.151.500	12.151.500	12.151.500
45	Sofa 311+Meja			1	SET	19.634.500	19.634.500	19.634.500	19.634.500	-	-
46	Rak Buku			2	Unit	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
47	Kendaraan Roda 2			6	UNIT	31.080.000	186.480.000	186.480.000	93.240.000	-	-
48	Mobil Dinas Roda 4			1	UNIT	675.000.000	675.000.000	675.000.000	486.306.000	-	-
II	Jumlah	Rp 2.109.877.900					Rp 4.149.941.400	Rp 2.038.763.000	Rp 1.383.519.400	Rp 425.288.100	425.288.100
No.	URAIAN BELANJA PRIORITAS (UTAMA) SKPD	Anggaran Murni	Data Dasar/ Kebutuhan Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Bertambah/ Berkurang	ANALISIS II	ANALISIS II	
			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah					
1	2	0	3	4	5	6	6	6			
3.1	Belanja Barang dan Jasa	1.848.729.500				4.350.196.700	2.501.467.200	1.197.647.200	497.647.200	497.647.200	
1	Bimtek bagi Pelaku Usaha	63.566.000	37.565.573	1	Kegiatan	163.566.000	163.566.000	100.000.000	-	-	-
2	Pengawasan Penanaman Modal	101.882.000	14.534.000	1	Kegiatan	101.882.000	101.882.000	-	-	-	-
3	Data Informasi	245.295.000	11.780.806	1	Kegiatan	245.295.000	245.295.000	-	-	-	-
4	Pelayanan	102.670.000	35.823.130	1	Kegiatan	102.670.000	102.670.000	-	-	-	-
5	Konsultasi	264.692.000	25.881.330	1	Kegiatan	264.692.000	264.692.000	-	-	-	-
6	Pemantauau Komitmen	110.800.000	14.189.798	1	Kegiatan	110.800.000	110.800.000	-	-	-	-
7	Promosi	193.434.500	32.700.000	1	Kegiatan	193.434.500	193.434.500	-	-	-	-
8	Strategi Promosi	299.468.000	2.160.000	1	Kegiatan	299.468.000	299.468.000	-	-	-	-
9	Peta	120.950.000	4.088.200	1	Kegiatan	120.950.000	120.950.000	-	-	-	-

10	<i>Kemitraan</i>	49.700.000	4.880.000	1	Kegiatan	49.700.000	49.700.000	-	-	-	-
11	<i>RUPM</i>	129.906.000		1	Kegiatan	129.906.000	129.906.000	-	-	-	-
12	<i>Penetapan Insentif Kemudahan Berusaha</i>	36.766.000	1.930.000	1	Kegiatan	36.766.000	36.766.000	-	-	-	-
13	<i>Tim Koordinasi Pengawas Penanaman Modal</i>	32.400.000		1	Tahun	32.400.000	32.400.000	-	-	-	-
14	<i>Tim Pembina PTSP</i>	32.400.000		1	Tahun	32.400.000	32.400.000	-	-	-	-
15	<i>Tim Monev SOP</i>	32.400.000		1	Tahun	32.400.000	32.400.000	-	-	-	-
16	<i>Tim Pengelola Pengaduan</i>	32.400.000		1	Tahun	32.400.000	32.400.000	-	-	-	-
17	<i>Service Exelence</i>			1	Kegiatan		520.600.000	520.600.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
18	<i>Diseminasi Penanaman Modal</i>			1	Kegiatan		500.000.000	500.000.000	200.000.000	-	-
19	<i>Makmin Petugas Pelayanan</i>			1	Tahun		159.500.000	159.500.000	-	-	-
20	<i>Sapras Pelayanan Publik</i>			1	Paket		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
21	<i>Pengecatan Pagar dan Teralis</i>			1	Paket	190.000.000	190.000.000	190.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
22	<i>Tablet Pelayanan</i>			2	Unit	19.377.600	38.755.200	38.755.200	38.755.200	38.755.200	38.755.200
23	<i>Bilboard</i>			2	Paket		323.720.000	323.720.000	150.000.000	-	-
24	<i>FGD Tim Teknis/Pengawas Namdal</i>			1	Kegiatan		150.000.000	150.000.000	75.000.000	-	-
25	<i>Peta Potensi/Peluang Investasi (turunan/lanjutan)</i>			1	dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-
26	<i>tutup selokan</i>			60	m2	398.200	23.892.000	23.892.000	23.892.000	23.892.000	23.892.000
27	<i>FGD Kajian IPRO serta strategi promosi Investasi</i>	-		1	Paket	200.000.000	200.000.000	200.000.000	75.000.000	-	-
28	<i>Sertifikasi Toefel bagi SDM Pelayanan Publik</i>	-		30	Orang	2.500.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000

3.2	Belanja Modal	-					762.815.100	762.815.100	762.815.100	762.815.100	762.815.100
28	Partisi/Sekat Pelayanan Publik Ruang Laktasi/Ruang Pengelola Pengaduan)			120	M2	1.538.500	184.620.000	184.620.000	184.620.000	184.620.000	184.620.000
29	Shopa Tamu			2	Paket	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
30	Horden			70	M2	780.400	54.628.000	54.628.000	54.628.000	54.628.000	54.628.000
31	Disabilitas serta Fasilitas Disabilitas			2	Paket	145.886.300	291.772.600	291.772.600	291.772.600	291.772.600	291.772.600
32	Kursi Terapi/Pijat Pelayanan Publik	0		2	unit	60.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
33	Karpet	0		5	M2	2.358.900	11.794.500	11.794.500	11.794.500	11.794.500	11.794.500
III	Jumlah	Rp 1.848.729.500					Rp 5.113.011.800	Rp 3.264.282.300	Rp 1.960.462.300	Rp 1.260.462.300	1.260.462.300

PERHITUNGAN TOTAL ANGGARAN

I	Uraian Belanja Langsung Rutin	Rp 7.218.178.642					Rp 5.876.723.242	-Rp 1.341.455.400	-Rp 1.341.455.400	-Rp 1.263.991.000	- 1.263.991.000
II	URAIAN BELANJA OPERASIONAL NON RUTIN SKPD /Penunjang	Rp 2.109.877.900					Rp 4.149.941.400	Rp 2.038.763.000	Rp 1.383.519.400	Rp 425.288.100	425.288.100
III	URAIAN BELANJA PRIORITAS (UTAMA) SKPD	Rp 1.848.729.500					Rp 5.113.011.800	Rp 3.264.282.300	Rp 1.960.462.300	Rp 1.260.462.300	1.260.462.300
	TOTAL (I ; II DAN III)	Rp 11.639.676.442					Rp 15.139.676.442	Rp 3.961.589.900	Rp 2.002.526.300	Rp 421.759.400	421.759.400

Rp -

PERHITUNGAN KEKURANGAN ANGGARAN

No.	URAIAN KEKURANGAN BELANJA SKPD	Jumlah	Data Dasar				Analisis Penambahan	Bertambah/Berkurang
			Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	6	3	4	5	6	6	
1	Belanja Pegawai	4.729.116.682				4.851.652.282	122.535.600	
2	Belanja Barang dan Jasa	6.910.559.760				7.781.270.560	870.710.800	
3	Belanja Modal					2.506.753.600	2.540.953.100	
II	Jumlah	Rp 11.639.676.442				Rp 15.139.676.442	Rp 3.534.199.500	